

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan esensi kebijakan otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk dapat mengembangkan diri. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah memberikan keleluasan kepada setiap daerahnya untuk menggali dan mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan potensi dan kepentingan daerahnya masing-masing.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber-sumber penerimaan tersebut antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri dengan komponen sebagai berikut; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain PAD yang sah. Dengan berbagai komponen sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat menjadi penyokong dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Karena dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Susanawati, Suparta, & Husaini, 2014). Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya, salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting

terhadap kontribusi penerimaan pembiayaan daerah adalah pajak daerah. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Waani, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tersebut, Kota Bandung sebagai salah satu daerah otonomi di Indonesia menggunakan pajak daerah sebagai upaya dalam pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*).

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pelayanan Pajak berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya. Berikut perkembangan realisasi komponen PAD Kota Bandung tahun 2013 sampai dengan 2016.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Realisasi Komponen PAD Kota Bandung Tahun 2013-2016**

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	PAD
1	2013	1.194.087.447	115.508.351	12.069.973	121.109.468	1.442.775.239
2	2014	1.399.598.856	99.192.319	9.356.757	207.909.364	1.716.057.298
3	2015	1.613.000.000	120.240.000	20.000.000	339.960.000	2.093.200.000
4	2016	2.186.416.770	201.683.255	20.000.000	343.316.745	2.751.416.770

(sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, data diolah)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat perbandingan penerimaan daerah dari berbagai komponen Pendapatan Asli Daerah. Sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung berasal dari pajak daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa

Kota Bandung memiliki sumber-sumber yang cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melihat seberapa besar persentase pajak daerah terhadap PAD Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**

**Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Bandung Tahun 2013-2016**

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pajak
1	2013	1.194.087.447	1.442.775.239	82,76%
2	2014	1.399.598.856	1.716.057.298	81,56%
3	2015	1.613.000.000	2.093.200.000	77,06%
4	2016	2.186.416.770	2.751.416.770	79,47%

(sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, jika dilihat dari tahun 2013 sampai dengan 2016, persentase pajak daerah tersebut cukup fluktuatif. Pada tahun 2013 hingga 2015 persentase pajak mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2015 sampai tahun 2016 persentase pajak kembali mengalami kenaikan.

Pemerintah Daerah Kota Bandung sendiri menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal tersebut di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Selanjutnya, kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung juga tidak lepas dari peran realisasi penerimaan setiap jenis-jenis pajak tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Jenis-Jenis Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Pajak Hotel	260.000.000.000	215.285.361.236
Pajak Restoran	170.000.000.000	181.868.358.705
Pajak Hiburan	60.000.000.000	50.449.101.884
Pajak Parkir	30.000.000.000	20.234.816.571
Pajak BPHTB	428.150.000.000	399.885.860.295
Pajak Penerangan Jalan	180.000.000.000	178.144.137.262
Pajak Reklame	15.000.000.000	18.107.052.336
Pajak Air Tanah	32.850.000.000	30.260.440.425
Pajak Bumi dan Bangunan	422.000.000.000	391.020.956.093

(sumber: LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015)

Seperti yang terlihat pada tabel 1.3 di atas, bahwa dari 9 (sembilan) jenis pajak, hanya terdapat 2 (dua) jenis pajak yang dapat mencapai target yaitu pajak restoran dan pajak reklame. Sebagian besar jenis pajak lainnya tidak mencapai target. Hal ini tentu akan berpengaruh pada total penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Selanjutnya, untuk melihat perkembangan realisasi pajak daerah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Target dan Realisasi Jenis-Jenis Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2016**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Pajak Hotel	260.000.000.000	274.728.642.717
Pajak Restoran	235.000.000.000	241.571.411.389
Pajak Hiburan	68.000.000.000	69.804.283.446
Pajak Parkir	26.000.000.000	28.699.948.562
Pajak BPHTB	660.000.000.000	440.329.214.279
Pajak Penerangan Jalan	173.200.000.000	177.358.328.595
Pajak Reklame	316.716.770.000	25.646.023.484

Pajak Air Tanah	32.500.000.000	33.501.856.324
Pajak Bumi dan Bangunan	415.000.000.000	417.134.044.862

(sumber: Laporan target dan realisasi BPPD Kota Bandung)

Berbeda pada tahun sebelumnya, pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa sebagian besar realisasi penerimaan jenis-jenis pajak daerah Kota Bandung sudah mencapai target. Namun, hanya terdapat 2 (dua) jenis pajak daerah yang masih belum mencapai target yaitu pajak reklame dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kemudian dapat dilihat pada tabel di atas, dimana Pemerintah Kota Bandung selalu menaikkan target pencapaian jenis-jenis pajak yang akan di pungut. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Walaupun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya belum memenuhi target, terutama pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 realisasi jenis-jenis pajak Kota Bandung sebagian besarnya dapat melebihi target yang dicanangkan. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan yang besar demi pembangunan daerah Kota Bandung.

Dari interpretasi tabel di atas, dinilai bahwa realisasi tiap-tiap jenis pajak mempengaruhi total penerimaan pajak daerah yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Sehingga untuk meningkatkan pajak daerah di Kota Bandung, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam penerimaan pajak daerah tersebut. Oleh karena itu, dilakukan analisis perhitungan efektivitas penerimaan pajak daerah serta kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Octovido, Sudjana, & Azizah, 2014). Kemudian, analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (pajak daerah) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut (Mikha, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai sumber penerimaan daerah yang paling tepat dari semua sumber penerimaan daerah, dan pendapatan dari sektor pajak di Kota Bandung berpengaruh cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah tentu berbeda-beda, oleh karena itu setiap daerah memberikan penekanan yang berbeda-beda pula pada setiap sumber pendapatan daerah (Putri, 2016).

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik penelitian, guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa perlu untuk menganalisis efektivitas serta kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah jenis-jenis pajak di Kota Bandung sudah efektif, serta jenis pajak mana yang memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dari tahun ke tahun. Selanjutnya dilakukan analisis kontribusi jenis-jenis pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah, untuk melihat jenis pajak mana yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Kemudian dilakukan analisis proyeksi untuk melihat proyeksi penerimaan jenis-jenis pajak Kota Bandung di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Jenis-Jenis Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas jenis-jenis pajak daerah di Kota Bandung tahun pada 2013-2016?
2. Bagaimana kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung pada tahun 2013-2016?

3. Bagaimana proyeksi jenis-jenis pajak Kota Bandung di masa yang akan datang?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai analisis efektivitas dan kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas jenis-jenis pajak daerah di Kota Bandung pada tahun 2013-2016.
2. Kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung pada tahun 2013-2016.
3. Proyeksi jenis-jenis pajak Kota Bandung di masa yang akan datang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan secara teori dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan kepada pemerintah daerah mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah untuk digunakan sebagai acuan pertimbangan perencanaan dan pengalokasian anggaran pajak daerah pada tahun-tahun selanjutnya.